

MENGURAI JARING KEMISKINAN: PERAN BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL, DAN PENDAPATAN DAERAH DI SIDENRENG RAPPANG

Syahrul¹, Budi Setiawati², Ansyari Monea³, Asrahmaulyana⁴, Qarina⁵

Email: sarusyahrul306@gmail.com

¹⁴⁵ Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²³ Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Financial Assistance Expenditure, Social Assistance Expenditure, Local Original Income (PAD), and Open Unemployment Rate on the poverty rate in Sidenreng Rappang Regency. The background of this study is based on the phenomenon of the increasing percentage of poor people in Sidenreng Rappang Regency in the last five years, although PAD, financial assistance expenditure and social assistance expenditure have increased, and unemployment has decreased. The research method used is a quantitative approach with secondary data analysis obtained from related agencies during the period 2009–2023. The results of the study indicate that the financial assistance expenditure variable has a significant effect on the poverty rate, while social assistance expenditure, PAD and unemployment rate have an insignificant effect. This study recommends that local governments evaluate the effectiveness of the allocation of social and financial assistance expenditures to be more targeted and strengthen poverty alleviation strategies through optimal utilization of PAD.

Keywords: *Poverty, Financial Assistance Expenditure, Social Assistance Expenditure, Local Original Income, Unemployment*

ARTICLE INFO

Received: 22 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Online: 04 Mei 2025

*Correspondence: Syahrul

E-mail:

sarusyahrul306@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir, meskipun PAD, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan, serta pengangguran mengalami penurunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait selama periode 2009–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja bantuan sosial, PAD dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas alokasi belanja

bantuan sosial dan keuangan agar lebih tepat sasaran serta memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan PAD secara optimal.

Kata kunci: Kemiskinan, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang hingga kini masih menjadi isu krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yakni memajukan kesejahteraan umum (Sucitra dkk, 2024). Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, kemiskinan tetap menjadi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach), di mana seseorang dikatakan miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Konsep ini diperkuat oleh Bank Dunia yang menetapkan batas garis kemiskinan sebesar US\$2,15 per kapita per hari dengan standar Purchasing Power Parity (PPP). Dengan pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga kebutuhan dasar nonmakanan (Triyulianto dkk, 2018). Sayangnya, angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang justru mengalami peningkatan meskipun berbagai program telah dilaksanakan.

Secara teori, John Maynard Keynes (1936) dalam (Safitridkk, 2022) mengemukakan konsep *poverty in the midst of plenty*, yaitu kemiskinan di tengah kelimpahan. Keynes menyoroti bahwa ketimpangan distribusi kekayaan dan kegagalan pasar dalam menyediakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi akar permasalahan kemiskinan. Fenomena tersebut terlihat nyata di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan tetap menunjukkan tren naik (Herrmann & Bucksch, 2014).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi semakin kompleks dengan adanya pengangguran yang memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan (Rukmana & Imaningsih, 2023). Pengangguran merupakan salah satu faktor penyumbang kemiskinan karena mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya pendapatan, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial dan kriminalitas (Kuswiyati & Utomo, 2022). Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, namun penurunan tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan.

Mankiw (2013) dalam (Su, 2018), menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehilangan pekerjaan bukan hanya menurunkan taraf hidup, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor informal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah (Asmuruf dkk, 2015). Secara teoritis, PAD berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Usman, 2020). Namun ironisnya, di Kabupaten Sidenreng Rappang, kenaikan PAD yang cukup signifikan tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan (Herrmann & Bucksch, 2014).

Selain PAD, salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari risiko sosial (Harsono, 2024). Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, alokasi belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Di samping itu, terdapat pula belanja bantuan keuangan sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan dan mengatasi ketimpangan sosial (Munandar dkk, 2023). Bantuan keuangan biasanya diberikan kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat dalam bentuk program-program khusus yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Namun, meskipun belanja bantuan keuangan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir, tetap saja angka kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan (Ariska & Ayu, 2023).

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (%), Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah), Belanja Bantuan Keuangan (Miliar Rupiah), dan Belanja Bantuan Sosial (Miliar Rupiah) Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	PAD (Miliar Rupiah)	Belanja Bantuan Keuangan (Miliar Rupiah)	Belanja Bantuan Sosial (Miliar Rupiah)
2019	4,79	4,35	125,73	138,32	1,59
2020	5,05	5,91	132,95	126,48	0
2021	5,04	4,93	136,81	128,85	0,03
2022	5,11	3,56	155,22	113,99	0,21
2023	5,14	3,29	166,55	116,41	0,25

Sumber : Badan Pusat Statistik SUL-SEL & Portal Data SKID 2025

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 4,79% pada tahun 2019 menjadi 5,14% pada tahun 2023. Angka ini menjadi perhatian serius mengingat selama periode tersebut pendapatan asli daerah dan berbagai belanja bantuan juga meningkat. Ketidakselarasan antara peningkatan PAD, belanja sosial, belanja keuangan, dengan penurunan angka kemiskinan mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang juga menunjukkan tren menurun, dari 4,35% pada tahun 2019 menjadi 3,29% pada tahun 2023. Walaupun demikian, penurunan angka pengangguran tersebut tidak serta-merta memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan (Febriani dkk, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti rendahnya kualitas pekerjaan, rendahnya upah minimum, dan kurangnya akses pendidikan, masih menjadi penyebab utama yang mendorong angka kemiskinan tetap tinggi.

Dilihat tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019, menyentuh angka Rp. 125,73 Miliar dimana angka ini terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2023, menyentuh angka Rp. 166,55 Miliar yang merupakan angka tertinggi pada lima tahun terakhir. Dimana dalam 5 tahun terakhir PAD Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan sebesar Rp.40,82 Miliar. Dengan naiknya PAD diharapkan pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu menggunakan PAD ini dengan baik agar masyarakat mendapatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan tabel 1.1 Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, terlihat adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 yang tercatat di angka Rp. 138,32 Miliar kemudian mengalami penurunan yang lumayan signifikan di tahun 2020 menjadi Rp. 126,48

Miliar yang disebabkan oleh adanya wabah global pada tahun itu dimana banyak anggaran di alihkan untuk pemulihan/penyembuhan. Setelah itu belanja bantuan keuangan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 128,85 Miliar. Walaupun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 113,99 Miliar yang merupakan terendah pada lima tahun terakhir. Tapi belanja bantuan keuangan kembali mengalami tren kenaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 116,41 Miliar.

Dari tabel 1.1 data Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang, terlihat mengalami penurunan lumayan signifikan dari tahun 2019-2023. Dimana pada tahun 2019 yang tercatat, Belanja Bantuan Sosial berada di angka Rp. 1,59 Miliar kemudian mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 0 hal ini disebabkan karena anggaran belanja bantuan sosial di alihkan untuk kepentingan kesehatan pada tahun itu. Setelah itu, belanja bantuan sosial mulai mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 0,03 Miliar, lalu naik lagi sebesar Rp. 0,21 Miliar, dan akhirnya berada di angka Rp. 0,25 Miliar pada tahun 2023.

Jika menilik lebih dalam, permasalahan kemiskinan yang terus meningkat di tengah meningkatnya PAD dan belanja pemerintah daerah menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut belum optimal dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan penelitian O. K. Siregar & Ramadhan (2020) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan jika pengelolaannya tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang lebih serius terkait efektivitas penggunaan APBD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Fenomena *poverty in the midst of plenty* yang disampaikan Keynes (1936) dalam (Safitridkk, 2022) tampaknya terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber daya dan potensi ekonomi daerah belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Kesenjangan dalam pengalokasian anggaran, kebijakan yang kurang tepat sasaran, serta kurangnya inovasi dalam program penanggulangan kemiskinan menjadi faktor penyebab utama mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar di daerah tersebut.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, urgensi penelitian mengenai pengaruh belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data empiris agar pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Juanda & Siregar, 2023) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat

kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut dengan konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, agar diketahui apakah fenomena yang sama juga terjadi di daerah tersebut, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.

Dari pembahasan di atas dimana kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat penting di Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka urgesi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang relevan. Meskipun PENGANGGURAN mengalami penurunan lima tahun terakhir dan PAD, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA BANTUAN SOSIAL mengalami kenaikan tetapi hal itu tidak membuat kemiskinan turun. Hal ini menandakan adanya faktor struktural yang belum di selesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada penurunan Kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai salah satu upaya akademik untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode yang memanfaatkan data numerik yang dikumpulkan secara sistematis untuk melihat hubungan antara variabel-variabel penelitian berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Nurfaida, 2024). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data runtut waktu (*time series*) selama periode 2009 hingga 2023. Data diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Portal Data SKID, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik untuk keperluan estimasi. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah memakai aplikasi pengolah data statistik yaitu EVIEWS dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data belanja bantuan keuangan, yaitu nilai realisasi transfer keuangan antar pemerintah daerah yang tercatat dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2009–2023; data belanja bantuan sosial, yaitu nilai realisasi belanja bantuan sosial yang ada dalam APBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama

periode 2009-2023; data Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai realisasi pendapatan asli daerah yang ada dalam APBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2009-2023; serta data tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase pengangguran terbuka kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2009-2024. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin per tahun dalam periode yang diamati.

Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan (Variabel Dependen); X_1 = Belanja Bantuan Keuangan; X_2 = Belanja Bantuan Sosial; X_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD); X_4 = Tingkat Pengangguran Terbuka; a = Konstanta (Intersep); $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen dan e = error term (kesalahan residu)

Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.2
Hasil Regresi Linear

Dependent Variable: Y					
Method: Least Squares					
Date: 05/09/25 Time: 18:48					
Sample: 2009 2023					
Included observations: 15					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	5.794015	0.624540	9.277255	0.0000	
X1	-0.008899	0.003049	-2.918663	0.0153	
X2	0.000201	0.007214	0.027894	0.9783	
X3	-5.51E-06	2.87E-05	-0.192310	0.8513	
X4	0.079286	0.084071	0.943092	0.3679	
R-squared	0.818869	Mean dependent var		5.649333	
Adjusted R-squared	0.746416	S.D. dependent var		0.674425	
S.E. of regression	0.339621	Akaike info criterion		0.939230	
Sum squared resid	1.153426	Schwarz criterion		1.175247	
Log likelihood	-2.044224	Hannan-Quinn criter.		0.936716	
F-statistic	11.30213	Durbin-Watson stat		0.710630	
Prob(F-statistic)	0.000993				

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan hasil output nilai konstanta sebesar 5.794015 dengan nilai koefisien regresi β_1 sebesar -0.008899, β_2 sebesar 0.000201, β_3 sebesar -5.51E-06 dan β_4 sebesar 0.079286.

Demikian formulasi persamaan yang di dapatkan kemudian disusun dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y = f(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Hasil persamaan yang telah didapat berdasarkan hasil regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 5.794015. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ketika Belanja Bantuan Keuangan (X1), Belanja Bantuan Sosial (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) memiliki nilai yang konstan atau tidak mengalami perubahan maka Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 5.794015%. (2) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Bantuan Keuangan (X1) sebesar -0.008899 yang artinya Belanja Bantuan Keuangan dan Kemiskinan memiliki pengaruh negatif yaitu Ketika Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp 1 maka Kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0.008899% dan sebaliknya. (3) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Bantuan Sosial (X2) sebesar 0.000201 yang artinya Belanja Bantuan Sosial dan Kemiskinan memiliki pengaruh positif yaitu Ketika Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka Kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0.000201% dan sebaliknya. (4) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar 0.00000551 yang artinya Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan memiliki pengaruh negatif yaitu ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka Kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar -0.0000051% dan sebaliknya. (5) Nilai koefisien regresi variabel tingkat Pengangguran terbuka (X4) sebesar 0.079286 yang artinya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan memiliki pengaruh positif yaitu ketika Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1% maka Kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar 0.079286% dan sebaliknya.

Tabel 1.3
Hasil Uji Determinan R-Square

R-squared	0.818869	Mean dependent var	5.649333
Adjusted R-squared	0.746416	S.D. dependent var	0.674425
S.E. of regression	0.339621	Akaike info criterion	0.939230
Sum squared resid	1.153426	Schwarz criterion	1.175247
Log likelihood	-2.044224	Hannan-Quinn criter.	0.936716
F-statistic	11.30213	Durbin-Watson stat	0.710630
Prob(F-statistic)	0.000993		

Sumber: Data diolah views12, 2025

Berdasarkan hasil output regresi, dengan nilai R-square sebesar 0.818869, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjelaskan sekitar 0.818869 jika di konversi kedalam bentuk persen sebesar 81,88%. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan proporsi atau persentase kontribusi variabel bebas (sepeerti belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran terbuka) terhadap variabel Y (inflasi), yaitu sebesar 81,88%. Sisahnya, sekitar 18,12%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.4
Hasil Uji Simultan

R-squared	0.818869	Mean dependent var	5.649333
Adjusted R-squared	0.746416	S.D. dependent var	0.674425
S.E. of regression	0.339621	Akaike info criterion	0.939230
Sum squared resid	1.153426	Schwarz criterion	1.175247
Log likelihood	-2.044224	Hannan-Quinn criter.	0.936716
F-statistic	11.30213	Durbin-Watson stat	0.710630
Prob(F-statistic)	0.000993		

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan output regresi, nilai F yang signifikan adalah 0,00, lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat di pahami bahwa secara keseluruhan, variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 1.5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.794015	0.624540	9.277255	0.0000
X1	-0.008899	0.003049	-2.918663	0.0153
X2	0.000201	0.007214	0.027894	0.9783
X3	-5.51E-06	2.87E-05	-0.192310	0.8513
X4	0.079286	0.084071	0.943092	0.3679

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Hasil ouput di atas mengkonfirmasi besaran signifikansi yang di hasilkan dari uji regresi. Hasil di atas menunjukkan pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y, di mana Nilai koefisien regresi variabel Belanja Bantuan Keuangan (X1) sebesar -0.008899 dengannilai probabilitas $0.0153 < 0.05$ dengan $t_{hitung} - 2.918 > t_{tabel} 2.228$ yang artinya Belanja Bantuan Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng rappang yaitu H_0 ditolak dan H_1 di terima. Nilai koefisiensi regresi variabel Belanja Bantuan Sosial (X2) sebesar 0.000201 dengan nilai probabilitas $0.9783 > 0,05$ dengan $t_{hitung} 0.027 < t_{tabel} 2.228$ yang artinya belanja bantuan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu H_0 diterima dan H_2 di tolak. Nilai koefisiensi regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar -0.00000551 dengan nilai probabilitas $0.851 > 0,05$ dengan $t_{hitung} 0.192 < t_{tabel} 2.228$ yang artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu H_0 di terima dan H_3 ditolak. Nilai koefisiensi regresi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) sebesar 0.029786 dengan probabilitas $0.367 > 0,05$ dengan $t_{hitung} 0.943 < t_{tabel} 2.228$ yang artinya Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu H_0 di terima dan H_4 di tolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Bantuan Keuangan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi variabel Belanja Bantuan Keuangan (X1) sebesar -0.008899 dengan nilai probabilitas $0.0153 < 0.05$ dengan ini berarti ada hubungan negatif antara belanja bantuan keuangan dan kemiskinan di Sidenreng Rappang. Ketika anggaran belanja bantuan keuangan di naikan maka angka kemiskinan akan menurun, dimana hal ini sudah sesuai dengan hipotesis. Hal ini dapat terjadi karena belanja bantuan keuangan, yang mencakup transfer dana atau barang ke masyarakat dimana bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian (1936) dalam (Hutahaean, 2019), mengatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah, termasuk belanja bantuan keuangan, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan mendorong konsumsi. Dalam jangka pendek, ini akan meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Begitupun dengan *Social Safety Net Theory* dimana dia berpendapat bahwa bantuan keuangan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dan miskin, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti pandemi atau krisis ekonomi. Bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menghindari kemiskinan ekstrem. Belanja bantuan keuangan dapat menjadi upaya dalam mempercepat dalam mengatasi kemiskinan di daerah. Apabila belanja bantuan keuangan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan sebagaimana mestinya, maka akan mampu mengurangi atau mengatasi kemiskinan di daerah dan pedesaan (Awalia dkk.).

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel belanja bantuan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dilihat dari nilai koefisien regresi variabel Belanja Bantuan Sosial (X2) sebesar 0.000201 dengan nilai probabilitas $0.9783 > 0,05$ dengan ini berarti ada hubungan positif antara belanja bantuan sosial dengan kemiskinan, dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis peningkatan belanja bantuan sosial cenderung diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dalam kenyataannya dampaknya belum cukup kuat atau konsisten untuk dapat dikatakan berpengaruh secara nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah dalam

bentuk bantuan sosial, belum ada dampaknya dalam menurunkan angka kemiskinan. Pengaruh positif ini bisa diartikan bahwa ketika belanja bantuan sosial meningkat, tingkat kemiskinan juga cenderung naik, atau setidaknya tidak turun secara substansial. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, besarnya yang tidak mencukupi, atau penggunaan bantuan yang bersifat konsumtif sehingga tidak berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Triyulianto et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Kemiskinan” dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial belum efektif dalam menurunkan kemiskinan jika tidak disertai dengan mekanisme penyaluran yang tepat dan program pendukung lainnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dapat dilihat dari Nilai koefisiensi regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar $-5.51E-06$ dengan nilai probabilitas $0.851 > 0,05$ dengan ini berarti ada hubungan negatif antara PAD dengan Kemiskinan. Dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat peningkatan PAD, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum terasa secara nyata. Secara teori, peningkatan PAD seharusnya memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan sosial yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, ketidaksignifikan pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alokasi PAD yang tidak tepat sasaran, penggunaan dana yang lebih banyak untuk belanja rutin daripada belanja produktif, atau kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan PAD secara efektif untuk program pengurangan kemiskinan.

Namun demikian, hasil negatif tidak signifikan ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal. Pertama, besarnya PAD yang diperoleh tidak secara otomatis mencerminkan pemerataan manfaat pembangunan, terutama jika alokasi belanja daerah tidak diarahkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan struktural kemiskinan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya penciptaan lapangan kerja, dan lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kedua, peningkatan PAD mungkin berasal dari sektor-sektor yang bersifat menguntungkan atau hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat

tertentu, seperti retribusi usaha besar, pajak hiburan, atau sektor perdagangan dan industri yang kurang menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah, sehingga angka kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai koefisiensi regresi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) sebesar 0.029786 dengan probabilitas $0.361 > 0,05$ dengan yang artinya ada hubungan positif antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan. Dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Artinya bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah pengangguran, dampaknya terhadap peningkatan angka kemiskinan belum terasa secara nyata. Walaupun secara teori, peningkatan TPT seharusnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemiskinan karena pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat. Namun, ketidaksignifikan pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya program bantuan sosial yang efektif, kegiatan ekonomi informal yang menyerap tenaga kerja, atau peran sektor pertanian yang masih dominan di daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juanda & Siregar, 2023) dengan judul "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka serta tidak mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori dari Todaro (2003) dalam (Karisma & Soejoto, 2010), dimana Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi pada tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah. Dalam hal peluang untuk mendapatkan kerja yang rendah berarti pengangguran. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2009 hingga 2023. Secara parsial, menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja bantuan sosial, PAD dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas alokasi belanja bantuan sosial dan keuangan agar lebih tepat sasaran serta memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan PAD secara optimal. Dari hasil penelitian di atas diharapkan dapat membantu dalam arah kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu berupa peningkatan akurasi data kemiskinan untuk memastikan program bantuan tepat sasaran, serta upaya penguatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Ariska, & Ayu. (2023). Skripsi implementasi bantuan pangan non tunai (bpnt) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kel. duampanua, kec. baranti, kab. sidrap.
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Awalia, S., Sumayya, S. A., Trip, J., Nomor, J., Blok, A., Kec, K., & Banten, K. S. (n.d.). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan, 156–175.
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274. <http://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Febriani, A., Rahim, A., Samsir, A., Alam, S., & Astuty, S. (2024). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Selatan, 6(3).
- Harsono, dkk. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810.
- Herrmann, H., & Bucksch, H. (2014). Self-Supporting. *Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik*, 1197–1197. http://doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6_191957
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 103–115. <http://doi.org/10.31685/kek.v3i2.411>
- Juanda, R., & Siregar, M. K. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera

- Utara Pada Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(1), 19.
<http://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12210>
- Kuswiyati, M., & Utomo, Y. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 710.
<http://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.615>
- Munandar, T. A., Imilda, & Ismail. (2023). Sistem Informasi Bantuan Keuangan Pada Dinas Keuangan Aceh. *Journal Innovations Computer Science*, 2(1), 7–13.
<http://doi.org/10.56347/jics.v2i1.122>
- Nurfaida. (2024). Analisis pengaruh subsidi BBM, jumlah uang beredar dan suku bunga terhadap inflasi di Indonesia, (file:///C:/Users/pemer/Downloads/4_Shelva+Edna+Safitri.pdf;file:///C:/Users/pemer/Downloads/4_Shelva+Edna+Safitri.pdf;file:///C:/Users/pemer/OneDrive/Desktop/TUGAS AKHIR/bab 1/4_Shelva+Edna+Safitri.pdf).
- Rukmana, S. H., & Imaningsih², N. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 826–833.
<http://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7342>
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Publik*, 11(2), 1–13.
- Su, A. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Sucitra, I. D., Pratikno, M. H., & Kawung, E. J. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Triyulianto, T., Syafa, B., Nurvita, R., Stia, P., Jakarta, L. A. N., Kemiskinan, T., ... Sosial, B. B. (2018). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Pembangunan adalah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar nega.
- Usman, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.